



NARASI DAMAI DI TENGAH POLARISASI: DAKWAH ISLAM SEBAGAI JEMBATAN REKONSILIASI SOSIAL

PEACE NARRATIVE AMIDST POLARIZATION: ISLAMIC DA'WAH AS A BRIDGE FOR SOCIAL RECONCILIATION

Andi Hadi Ibrahim Baso¹, Mahmuddin², Hasan bin Juhanis^{3*}

^{1,2}Dakwah dan Komunikasi, Dirasaat Islamiyah, UINAM

³Ahwal Syakhsiyah, Fakultas Agama Islam, UNISMUH

Email: iandihadi@yahoo.co.id¹, mahmuddin.dakwah@uin-alauddin.ac.id², hasanbinjuhanis@unismuh.ac.id^{3*}

Article Info

Article history :

Received : 16-12-2025

Revised : 17-12-2025

Accepted : 19-12-2025

Published : 21-12-2025

Abstract

*This study examines the critical role of Islamic dakwah (preaching) in fostering social reconciliation amidst escalating social, political, and religious polarization in contemporary Indonesia, particularly intensified after the 2014 and 2019 presidential elections. This polarization, predominantly affective rather than ideological, has eroded social cohesion, fueled hate speech and disinformation, and undermined trust in democratic institutions. Utilizing a qualitative approach, this research re-conceptualizes dakwah as a holistic, transcendental, and social communication process, moving beyond conventional, exclusive models. The findings highlight that dakwah, rooted in core Islamic principles such as *rahmatan lil 'alamin* (mercy for all creation), *ukhuwah* (brotherhood), *musyawarah* (deliberation), and *al-'adl wal ihsān* (justice and benevolence), offers a robust theological and sociological foundation for peace-building. Effective contemporary strategies include proactive digital counter-narratives, empathetic interfaith dialogue, peace literacy education, and cultural/social dakwah *bil-hāl* (action-based preaching). The study concludes that by embracing these inclusive and adaptive strategies, dakwah can effectively mitigate tensions, counter hate narratives, and rebuild social cohesion, transforming conflict into harmony and fostering a healthy public sphere.*

Keywords : Da'wah, Polarization, Reconciliation

Abstrak

Penelitian ini mengkaji peran krusial dakwah Islam dalam mendorong rekonsiliasi sosial di tengah meningkatnya polarisasi sosial, politik, dan keagamaan di Indonesia kontemporer, yang khususnya semakin intensif setelah pemilihan presiden tahun 2014 dan 2019. Polarasi ini, yang lebih bersifat afektif daripada ideologis, telah mengikis kohesi sosial, memicu ujaran kebencian dan disinformasi, serta merusak kepercayaan terhadap lembaga-lembaga demokrasi. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif, penelitian ini mengonseptualisasi ulang dakwah sebagai proses komunikasi sosial, transendental, dan holistik, yang bergerak melampaui model-model konvensional yang bersifat eksklusif. Temuan penelitian menunjukkan bahwa dakwah yang berakar pada prinsip-prinsip inti Islam seperti *rahmatan lil 'alamin* (rahmat bagi semesta alam), *ukhuwah* (persaudaraan), *musyawarah*, dan *al-'adl wal ihsān* (keadilan dan kebijakan), menawarkan landasan teologis dan sosiologis yang kokoh bagi pembangunan perdamaian. Strategi kontemporer yang efektif mencakup kontra-narasi digital yang proaktif, dialog antariman yang empatik, edukasi literasi perdamaian, serta dakwah *bil-hāl* (dakwah melalui tindakan nyata) secara budaya dan sosial. Studi ini menyimpulkan bahwa dengan merangkul strategi yang inklusif dan adaptif ini, dakwah dapat secara efektif memitigasi ketegangan, melawan narasi kebencian, dan membangun kembali kohesi sosial, sehingga mengubah konflik menjadi harmoni serta menumbuhkan ruang publik yang sehat.

Kata Kunci: Dakwah, Polarisasi, Rekonsiliasi



PENDAHULUAN

Indonesia kontemporer menghadapi tantangan berat: meningkatnya polarisasi sosial, politik, dan agama, terutama meningkat setelah pemilihan presiden 2014 dan 2019. Fenomena ini telah melampaui perbedaan politik yang sehat, berubah menjadi polarisasi afektif di mana masyarakat dibagi bukan oleh ideologi tetapi oleh sentimen emosional dan identitas kelompok yang kaku. Persaingan politik telah menjadi “persaingan emosional untuk hidup,” dengan identitas agama sering mendominasi wacana kebijakan rasional. Dampak destruktif dari polarisasi ini terbukti di semua lapisan masyarakat, secara signifikan mengikis kohesi sosial, mendorong ujaran kebencian, disinformasi, dan tipuan di ruang publik, terutama media sosial, yang secara sistematis memperdalam perpecahan dan menciptakan “ruang gema” di mana dialog konstruktif menjadi tidak mungkin. Situasi ini menghambat pembuatan kebijakan publik, mengurangi kepercayaan publik terhadap lembaga-lembaga demokrasi, dan berkontribusi pada apa yang diidentifikasi oleh para ilmuwan politik sebagai “kemunduran demokrasi” atau “autokratisasi,” yang menimbulkan ancaman nyata bagi keberlanjutan demokrasi Indonesia. Lebih jauh lagi, kondisi ini mengarah pada tidak hanya fragmentasi emosional tetapi juga fragmentasi epistemologis, di mana segmen sosial yang berbeda hidup dalam realitas yang sama sekali berbeda, membuat rekonsiliasi sangat sulit karena kurangnya kesepakatan tentang fakta-fakta dasar dan kerangka moral. Dalam lanskap ketegangan ini, dakwah (khotbah) Islam memegang posisi yang unik dan strategis sebagai media komunikasi agama. Sering dianggap sempit sebagai kuliah belaka, dakwah pada dasarnya adalah proses komunikasi holistik dengan potensi signifikan untuk mengurangi konflik dan membangun narasi damai. Sebagai agama mayoritas di Indonesia, Islam memiliki modal teologis dan sosial yang kuat untuk berfungsi sebagai jembatan rekonsiliasi, asalkan nilai-nilai universalnya diartikulasikan dan dilaksanakan dengan tepat. Oleh karena itu, ada kebutuhan mendesak untuk merumuskan ulang dan mengarahkan ulang strategi dakwah agar relevan dan efektif dalam mengatasi tantangan kontemporer, beralih dari model konvensional, eksklusif, dan doktriner menuju pendekatan persuasif, humanistik, dan inklusif. Penelitian ini bertujuan untuk berkontribusi secara akademis dan praktis untuk pengembangan model dakwah Islam kontekstual dan responsif yang tidak hanya meningkatkan kesalehan individu tetapi juga secara aktif berkontribusi pada penyembuhan luka sosial dan memperkuat persatuan nasional.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif untuk menyelidiki peran dakwah Islam dalam rekonsiliasi sosial di tengah polarisasi di Indonesia. Studi ini terutama teoretis, mengacu pada literatur yang ada dan analisis tekstual daripada kerja lapangan empiris. Materi penelitian ini terdiri dari beragam jurnal akademik, buku, dan teks agama yang membahas polarisasi sosial, dakwah Islam, dan rekonsiliasi. Sumber daya utama termasuk artikel ilmiah tentang polarisasi politik Indonesia (misalnya, Jati, 2020, hal. 155 dan Marlef et al., 2025, hal. 157), analisis kemunduran demokrasi (misalnya, Mietzner, 2024, hlm. 887-905), dan karya-karya yang mengeksplorasi dasar-dasar teologis dan sosiologis dakwah Islam (misalnya, Muthmainnah, 2015, hlm. 245-256). Selain itu, sumber-sumber Islam utama seperti Al-Qur'an dan Hadis, bersama dengan interpretasinya (misalnya, Shihab, 2002, hlm. 552 dan al-'Asqalānī, 1379 H, hal. 57), membentuk dasar tekstual inti untuk memahami konsep-konsep rahmatan lil 'ālamīn, al-ukhuwah, musyawarah, dan 'adl wal ihsān.



Penelitian ini tidak memiliki lokasi geografis tertentu karena merupakan studi berbasis perpustakaan, dengan fokus pada analisis konseptual dan teoritis dari data yang ada. Masalah penelitian utama yang dibahas adalah meningkatnya polarisasi sosial, politik, dan agama di Indonesia kontemporer, khususnya pasca-pemilihan presiden 2014 dan 2019, yang telah menyebabkan polarisasi afektif, erosi kohesi sosial, dan kemunduran demokrasi. Polarisasi ini ditandai oleh sentimen emosional dan identitas kelompok yang kaku, bukan perbedaan ideologis, dan diperburuk oleh ujaran kebencian, disinformasi, dan pembentukan “ruang gema” dalam wacana publik, terutama di media sosial. Studi ini bertujuan untuk mengevaluasi kembali dan mengarahkan ulang strategi dakwah untuk secara efektif melawan kekuatan yang memecah belah ini dan mempromosikan rekonsiliasi sosial.

Pengumpulan data dilakukan melalui tinjauan literatur yang komprehensif, yang melibatkan identifikasi, pengambilan, dan analisis kritis teks akademik dan agama yang relevan. Prosesnya termasuk pemindaian sistematis database dan platform ilmiah untuk mengumpulkan informasi tentang anatomi dan dampak polarisasi, dasar-dasar teologis dan sosiologis dakwah Islam untuk perdamaian, dan strategi dakwah kontemporer. Pemilihan teks memprioritaskan teks yang memberikan analisis mendalam, temuan empiris (jika tersedia untuk polarisasi), dan kerangka kerja konseptual yang berkaitan dengan pertanyaan penelitian. Perhatian khusus diberikan pada studi yang menyoroti peran politik identitas, politisasi agama, media sosial, dan interpretasi agama eksklusif sebagai pendorong polarisasi.

Analisis data melibatkan pendekatan interpretatif tematik dan kritis. Informasi yang diambil dari literatur dikategorikan berdasarkan pertanyaan penelitian, memungkinkan untuk pemeriksaan terstruktur dari setiap tema. Analisis berfokus pada sintesis temuan dari berbagai sumber untuk membangun pemahaman yang koheren tentang dinamika dan dampak polarisasi, dan untuk menggambarkan fondasi teologis dan sosiologis dakwah sebagai instrumen untuk rekonsiliasi. Selanjutnya, penelitian ini menilai secara kritis praktik-praktik dakwah yang ada dan mengusulkan strategi kontemporer, seperti konstruksi kontra-naratif di ruang digital, komunikasi empatik, dialog antaragama, pendidikan literasi perdamaian, dan dakwah budaya/sosial (dakwah bil-hāl). Tujuannya adalah untuk mengidentifikasi bagaimana strategi ini dapat berfungsi sebagai jembatan untuk mengurangi ketegangan, memerangi narasi kebencian, dan membangun kembali kohesi sosial di Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Polarisasi Sosial dalam Konteks Indonesia Kontemporer

1. Definisi dan Bentuk Polarisasi

Polarisasi, dalam konteks ilmu sosial, merujuk pada pembelahan masyarakat ke dalam dua kubu yang berseberangan secara tajam (Atika Marlef dkk. 2025, h. 157). Dalam analisis fenomena di Indonesia, penting untuk membedakan antara polarisasi ideologis, yang berakar pada perbedaan substantif mengenai kebijakan, dengan polarisasi afektif. Polarisasi afektif didefinisikan sebagai "kecenderungan individu untuk memandang partisan dari kubu lawan secara negatif dan partisan dari kubu sendiri secara positif". Berbagai studi menunjukkan bahwa polarisasi yang terjadi di Indonesia lebih dominan bersifat afektif, di mana sentimen "suka" dan "tidak suka" terhadap identitas kelompok menjadi lebih kuat daripada perdebatan



programatik. Pembelahan ini didorong oleh proses penyortiran sosial (*social sorting*) yang mengelompokkan masyarakat berdasarkan garis identitas agama dan kedaerahan, bukan berdasarkan spektrum ideologi politik kiri-kanan yang jelas (Jati, 2019).

Bentuk polarisasi ini termanifestasi dalam berbagai arena kehidupan. Secara politik, ia terlihat jelas dalam dikotomi antara kelompok "pro-pemerintah" dan "anti-pemerintah" yang saling menegasikan. Secara keagamaan, polarisasi ini diekspresikan melalui narasi-narasi yang memecah belah, seperti "Partai Allah versus Partai Setan," yang secara efektif membungkai kontestasi politik sebagai perang suci dan mendehumanisasi lawan politik. Di ranah sosial-budaya, fenomena ini melahirkan istilah-istilah peyoratif seperti "cebong" untuk pendukung Joko Widodo dan "kampret" untuk pendukung Prabowo Subianto. Istilah-istilah ini, yang awalnya muncul di media sosial, dengan cepat meresap ke dalam percakapan sehari-hari dan berfungsi sebagai penanda identitas yang memperkuat segregasi sosial dan kebencian antar kelompok (Muhammad Irfan, 2021, h. 83-96).

2. Faktor-Faktor Pendorong Polarisasi

Eskalasi polarisasi di Indonesia didorong oleh interaksi kompleks antara beberapa faktor kunci. Pertama, **politik identitas dan politisasi agama** menjadi pendorong utama. Pemilihan Presiden 2019 menjadi contoh paling gamblang di mana simbol-simbol, figur (ulama), dan seremoni keagamaan (seperti *Ijtima' Ulama*) secara sistematis dimobilisasi untuk melegitimasi satu kandidat dan mendekreditasi kandidat lainnya. Agama, dalam konteks ini, ditransaksikan dan digunakan sebagai "senjata" untuk mengalahkan lawan politik, yang pada akhirnya memicu menguatnya "politik kebencian" (*hate politics*) dan menciptakan perpecahan tajam di kalangan umat beragama itu sendiri (Ronaldo dan Darmaiza, h. 85.).

Kedua, **peran media sosial dan disinformasi** berfungsi sebagai akselerator yang mempercepat dan memperdalam pembelahan. Arsitektur platform media sosial, dengan algoritma yang dirancang untuk memaksimalkan "keterlibatan" (*engagement*), secara inheren lebih menyukai konten yang bersifat emosional, provokatif, dan memecah belah (Wardani, h. 2). Hal ini menciptakan "ruang gema" (*echo chambers*) dan "gelembung filter" (*filter bubbles*) yang mengisolasi pengguna dari pandangan yang berbeda dan terus-menerus memperkuat bias yang sudah ada (Marlef dkk., 2025, h. 159). Studi menunjukkan bahwa media sosial menjadi kanal utama bagi transmisi sentimen kebencian, seperti sentimen anti-Tionghoa, yang secara langsung berkorelasi dengan preferensi politik (Pepinsky, h. 205). Fenomena ini diperparah oleh operasi "buzzer" bayaran yang secara terkoordinasi menyebarkan disinformasi, fitnah, dan narasi adu domba untuk memanipulasi opini publik dan mendekreditasi suara-suara kritis, yang pada akhirnya berkontribusi pada fragmentasi masyarakat sipil (Giga Focus, 2025, h. 10).

Ketiga, menguatnya **interpretasi agama yang eksklusif** menyediakan fondasi ideologis bagi polarisasi. Narasi keagamaan yang menekankan puritanisme, memusuhi perbedaan (*the other*), dan mengklaim monopoli atas kebenaran menciptakan lahan subur bagi politisi untuk mengeksplorasi sentimen dan kebencian yang telah ada di Masyarakat (Jati, h. 158). Ketika pandangan keagamaan menjadi kaku dan tertutup, ruang untuk dialog dan kompromi menyempit, dan identitas agama menjadi benteng pemisah alih-alih jembatan pemersatu. Kombinasi dari ketiga faktor ini menciptakan sebuah siklus yang saling menguatkan: elit politik memanfaatkan identitas agama untuk mobilisasi, media sosial



mengamplifikasi pesan-pesan yang memecah belah, dan interpretasi agama yang kaku memberikan justifikasi teologis bagi perpecahan tersebut (Jati, h. 158, and Pepinsky, h. 208).

3. Dampak Polarisasi Terhadap Kehidupan Berbangsa dan Beragama

Dampak kumulatif dari polarisasi afektif yang mendalam ini sangat merusak tatanan sosial dan demokrasi Indonesia. Di tingkat masyarakat, polarisasi melemahkan kohesi dan solidaritas nasional, meningkatkan intoleransi sosial, dan memicu konflik horizontal yang dapat berujung pada kekerasan (Wardani, h. 157). Kepercayaan antarwarga terkikis, digantikan oleh kecurigaan dan permusuhan yang merusak modal sosial yang telah dibangun selama bertahun-tahun. Relasi sosial menjadi rapuh, di mana perbedaan pilihan politik dapat merusak hubungan pertemanan dan kekerabatan yang telah lama terjalin (Baan, h. 2).

Di tingkat kelembagaan, polarisasi menyebabkan kebuntuan politik (*political gridlock*), di mana kompromi menjadi sulit dicapai, sehingga menghambat proses pembuatan kebijakan yang efektif untuk kepentingan publik. Lebih jauh lagi, polarisasi mengikis kepercayaan publik terhadap institusi-institusi fundamental negara, termasuk pemerintah, parlemen, dan media. Ketika setiap kebijakan dan informasi disaring melalui lensa partisan, legitimasi institusi negara dipertanyakan, memicu krisis kepercayaan yang dapat membahayakan stabilitas jangka panjang. Fenomena ini secara keseluruhan berkontribusi pada penurunan kualitas demokrasi di Indonesia, sebuah tren yang dicatat oleh berbagai indeks demokrasi global, yang menandai adanya proses regresi demokrasi atau "pembelokan ke arah iliberal" (*illiberal turn*) dalam politik Indonesia (Marlek, dkk., 2025, h. 157, and Mietzer, h. 888, and Muhammad Aulia, 2021).

Secara mendalam, kondisi ini tidak hanya menciptakan perpecahan emosional, tetapi juga fragmentasi epistemik. Artinya, polarisasi telah sampai pada titik di mana segmen-segmen masyarakat yang berbeda tidak lagi hanya tidak setuju satu sama lain, tetapi mereka hidup dalam realitas yang sama sekali berbeda. Mereka memiliki sumber informasi yang berbeda, "fakta" yang berbeda, dan kerangka moral yang berbeda untuk menafsirkan dunia. Kehancuran landasan realitas bersama ini membuat rekonsiliasi menjadi tantangan yang luar biasa berat, karena dialog tidak mungkin terjadi jika tidak ada kesepakatan mengenai fakta-fakta dasar. Ini adalah tantangan yang jauh lebih dalam daripada sekadar menyembuhkan luka emosional; ini adalah tentang membangun kembali sebuah kenyataan Bersama (Marlek, dkk., 2025, h. 159).

Dakwah Islam sebagai Instrumen Rekonsiliasi Sosial

1. Konsep Dakwah sebagai Komunikasi Transendental dan Sosial

Untuk memahami potensi dakwah sebagai jembatan rekonsiliasi, konsep dakwah itu sendiri harus diperluas melampaui persepsi umum yang sempit. Dakwah bukanlah sekadar aktivitas mengajak (*proselytizing*) atau ceramah satu arah, melainkan sebuah proses komunikasi yang holistik dan multidimensional. Ia memiliki dimensi transendental, yaitu upaya untuk menghubungkan manusia dengan Sang Pencipta Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui penyampaian risalah-Nya. Namun, pada saat yang sama, ia juga memiliki dimensi sosial yang tak terpisahkan, yaitu upaya untuk membangun hubungan yang harmonis, adil, dan penuh kasih sayang antar sesama manusia. Dakwah yang efektif adalah dakwah yang mampu menyeimbangkan kedua dimensi ini, yang tidak hanya berfokus pada peningkatan kesalehan



ritual individu, tetapi juga secara aktif berkontribusi pada perbaikan kondisi sosial (*islāh al-mujtama'*) dan terwujudnya kedamaian di tengah masyarakat (Muthmainnah, 2023, h. 23).

Dalam konteks polarisasi, dakwah yang hanya menekankan pada aspek transendental tanpa kepekaan sosial dapat menjadi bagian dari masalah, misalnya dengan memperkuat identitas kelompok yang eksklusif. Sebaliknya, dakwah yang berorientasi pada rekonsiliasi sosial memahami bahwa tujuan utama dari risalah Islam adalah untuk mewujudkan kemaslahatan dan kedamaian di muka bumi. Oleh karena itu, dakwah menjadi sebuah proses komunikasi strategis yang bertujuan untuk mentransformasi konflik menjadi harmoni, kebencian menjadi kasih sayang, dan perpecahan menjadi persatuan, dengan berlandaskan pada nilai-nilai luhur yang terkandung dalam Al-Qur'an dan Sunnah (Khazanah, h. 2).

2. Fondasi Teologis Narasi Damai dalam Islam

Potensi dakwah sebagai instrumen rekonsiliasi tidak muncul dari ruang hampa, melainkan berakar kuat pada fondasi teologis yang kokoh dalam sumber-sumber primer Islam. Terdapat beberapa konsep kunci dalam Al-Qur'an dan Hadis yang secara eksplisit mendukung narasi damai, inklusivitas, dan persaudaraan. Konsep-konsep ini, jika digali dan diartikulasikan dengan tepat, dapat menjadi landasan spiritual dan intelektual bagi gerakan dakwah rekonsiliatif.

a. *Rahmatan lil 'Ālamīn* (Rahmat bagi Seluruh Alam)

Prinsip ini merupakan visi universal dari misi kenabian Muhammad ﷺ, sebagaimana ditegaskan dalam firman Allah SWT:

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ

Terjemahnya:

"Dan Kami tidak mengutus engkau (Muhammad) melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi seluruh alam." (QS. Al-Anbiya' : 107).

Penafsiran terhadap ayat ini menjadi kunci untuk membangun teologi perdamaian yang inklusif. M. Quraish Shihab dalam *Tafsir Al-Misbah* menjelaskan bahwa penggunaan kata '*ālamīn*' menunjukkan cakupan rahmat yang seluas-luasnya, tidak terbatas hanya untuk umat Islam (M. Quraish Shihab, 2002, h. 552). Bahwa risalah Muhammad saw. terbatas pada tujuan untuk menjadi rahmat bagi seluruh alam, yakni bagi semua makhluk yang berakal. Rahmat beliau saw. tampak dalam kenyataan bahwa beliau diutus pada masa kosong dari rasul-rasul, untuk menyelamatkan manusia dari berbagai khayalan yang telah menjerumuskan mereka, sehingga mereka hidup dalam kegelapan pekat yang membuat mereka tidak mampu membedakan antara yang benar dan yang batil. Mereka saling menumpahkan darah, permusuhan telah menggerus semua makna kebaikan dalam fitrah mereka, dan telah mengeringkan setiap mata air kasih sayang dalam hati mereka. Beliau saw. menjadi rahmat dengan syariatnya yang memuat segala kemaslahatan bagi hamba. Semua yang ada di dalamnya adalah maslahat, mencakup segala bentuk kebaikan baik secara langsung, secara isyarat, maupun dengan menetapkan kaidah-kaidah dasar bagi setiap manfaat kemanusiaan (Abu Zahrah, Muhammad bin Ahmad, h. 4928). Prinsip *rahmatan lil 'ālamīn* secara fundamental menolak segala bentuk pemahaman dan praktik keagamaan yang



bersifat eksklusif, diskriminatif, dan menebar kebencian, serta menjadi landasan teologis utama untuk membangun hubungan yang harmonis dalam masyarakat yang plural.

b. *Ukhuwah* (Persaudaraan)

Konsep persaudaraan dalam Islam memiliki dimensi yang mendalam dan menjadi pilar utama dalam membangun kohesi sosial. Al-Qur'an secara tegas menyatakan ikatan persaudaraan di antara orang-orang beriman dan kewajiban untuk mendamaikan perselisihan:

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْرَوْهُ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخْوَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرَحَّمُونَ

Terjemahnya:

"Orang-orang beriman itu sesungguhnya bersaudara. Sebab itu damaikanlah (perbaikilah hubungan) antara kedua saudaramu itu dan takutlah terhadap Allah, supaya kamu mendapat rahmat." (QS. Al-Hujurat: 10).

Sesungguhnya orang-orang mukmin itu adalah bersaudara karena mereka bersandar (bersandar kembali) pada satu asal, yaitu iman yang menjadikan hidup kekal. Karena asal (itu) bermula dari Nabi ﷺ, maka beliau adalah bapak orang-orang mukmin dan istri-istrinya adalah ibu-ibu mereka. Kalimat ini adalah penjelasan dan penegasan atas perintah untuk melakukan perdamaian (Muhammad Thanā' Allāh al-Mazharī, Juz 9, h. 50). Persaudaraan di sini didasarkan pada ikatan akidah yang melampaui ikatan darah. Namun, cakupan konsep ini diperluas secara etis melalui sabda Nabi Muhammad saw. sebagaimana berikut dalam (al-Bukhārī, Muhammad bin Ismā‘il Abū ‘Abdillāh, juz 1, h. 12):

عَنْ أَنَسِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ، حَتَّىٰ يُحِبَّ لِأَخِيهِ مَا يُحِبُّ
لِنَفْسِهِ»

Artinya:

"Dari Anas, dari Nabi ﷺ, beliau bersabda: 'Tidaklah beriman salah seorang di antara kalian hingga ia mencintai untuk saudaranya apa yang ia cintai untuk dirinya sendiri.'"

Al-Hafizh Ibnu Hajar al-'Asqalani dalam kitab syarahnya yang monumental, *Fath al-Bārī*, memberikan penjelasan mendalam mengenai hadis ini. Beliau menegaskan bahwa frasa *lā yu'minu* (tidak beriman) tidak berarti menafikan keimanan secara total hingga menyebabkan seseorang menjadi kafir, melainkan menafikan kesempurnaan iman (*kamāl al-īmān*). Lebih lanjut, meskipun lafaz *akhīhi* (saudaranya) dalam konteks primernya merujuk pada saudara seiman, para ulama seperti Imam an-Nawawi memperluas maknanya hingga mencakup persaudaraan kemanusiaan secara universal (*ukhuwwah insāniyyah*). Dalam konteks ini, mencintai "saudara" non-Muslim diwujudkan dengan menginginkan kebaikan tertinggi untuknya sebagaimana kita menginginkannya untuk diri kita sendiri, yaitu hidayah dan keselamatan di dunia dan akhirat. Penafsiran yang luas ini memberikan landasan etis yang kuat bagi dakwah untuk membangun empati dan solidaritas yang melintasi batas-batas primordial (Ibnu Hajar al-'Asqalānī, 1379H, h. 59).

c. *Musyawarah* (Musyawarah/Deliberasi)



Prinsip musyawarah merupakan fondasi bagi etika komunikasi dan pengambilan keputusan dalam Islam. Allah swt. secara langsung memerintahkan Nabi-Nya untuk melakukan musyawarah, meskipun beliau menerima wahyu:

وَشَارُرْ هُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَّمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ

Terjemahnya:

"...dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertawakallah kepada Allah..." (QS. Ali 'Imran: 159).

Imam Ibnu Jarir ath-Thabari dalam tafsirnya menjelaskan bahwa perintah ini memiliki beberapa hikmah yang mendalam. Meskipun Nabi Muhammad saw. tidak membutuhkan pandangan manusia karena dibimbing langsung oleh wahyu, Allah memerintahkannya untuk bermusyawarah demi menenangkan hati para sahabatnya, menunjukkan penghargaan, dan yang terpenting, untuk meletakkan sebuah preseden dan sunnah yang harus diikuti oleh umatnya setelah beliau wafat (Abū Ja'far Muḥammad ibn Jarīr al-Ṭabarī, 2000, h. 342-344). Musyawarah adalah manifestasi dari sikap rendah hati, pengakuan atas keterbatasan diri, dan penghormatan terhadap pandangan orang lain. Dalam konteks masyarakat yang terpolarisasi, dakwah yang mengedepankan prinsip musyawarah adalah dakwah yang menolak pendekatan otoriter dan pemaksaan kehendak. Ia mempromosikan dialog, deliberasi, dan pencarian solusi bersama sebagai jalan untuk menyelesaikan perbedaan dan membangun konsensus (47).

d. *Al-'Adl wal Ihsān* (Keadilan dan Kebaikan)

Keadilan dan kebaikan adalah dua pilar etika sosial dalam Islam yang diperintahkan secara bersamaan dalam Al-Qur'an:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَا عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعْظُمُ
لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

Terjemahnya:

"Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil, berbuat kebaikan, dan memberi kepada kaum kerabat. Dan Dia melarang dari perbuatan keji, kemungkaran, dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran." (QS. An-Nahl: 90).

Para mufasir, termasuk Ibnu Katsir, menjelaskan perbedaan fundamental antara kedua konsep ini. *Al-'Adl* (keadilan) adalah prinsip kesetaraan, keseimbangan, dan memberikan kepada setiap pihak haknya secara proporsional. Ini adalah standar minimum yang harus ditegakkan untuk menjaga stabilitas dan ketertiban sosial. Keadilan dalam Islam bersifat universal, bahkan harus ditegakkan terhadap musuh sekalipun (QS. Al-Ma'idah : 8) (Quraish Shihab, 1996, h. 12). Namun, untuk mencapai rekonsiliasi sejati, Islam mendorong umatnya untuk naik ke tingkat *al-Ihsān*. *Ihsān* adalah berbuat lebih baik dari sekadar adil; ia adalah kebaikan, kemurahan hati, dan keunggulan akhlak. *Ihsān* berarti membalaikan keburukan dengan kebaikan, memaafkan ketika memiliki hak untuk membalaikan, dan memberi lebih dari yang seharusnya. Dakwah rekonsiliatif harus menyerukan kedua



hal ini: penegakan keadilan struktural untuk mengatasi ketidakadilan yang menjadi akar konflik, sekaligus promosi budaya *ihsān* dalam interaksi interpersonal untuk menyembuhkan luka dan membangun kembali kepercayaan (Hamam Faizin, 2017, h. 113).

Keempat prinsip ini—*rahmah*, *ukhuwah*, *musyawarah*, dan '*adl-ihsān*'—bukanlah sekadar daftar kebijakan yang terpisah. Mereka membentuk sebuah kerangka etika yang terintegrasi dan saling bergantung untuk kehidupan publik. *Rahmatan lil 'ālamīn* berfungsi sebagai visi atau tujuan tertinggi (*maqṣad*). *Ukhuwah* menyediakan fondasi sosial berupa ikatan solidaritas. *Al-'Adl wal Ihsān* menjadi norma-norma yang mengatur interaksi. Sementara *Musyawarah* menyediakan mekanisme politik untuk mengelola perbedaan. Dakwah yang efektif untuk rekonsiliasi harus mampu mengartikulasikan dan mencontohkan keseluruhan kerangka kerja ini secara holistik, mengubah tujuannya dari sekadar "mengajarkan perdamaian" menjadi "menumbuhkan ruang publik yang adil, deliberatif, dan penuh kasih sayang".

3. Analisis Peran Aktor dan Lembaga Dakwah

Landasan teologis di atas menjadi hidup dan relevan melalui peran aktif para aktor dan lembaga dakwah di Indonesia. Sejarah dan realitas kontemporer menunjukkan bagaimana figur dan organisasi tertentu telah menjadi garda terdepan dalam mengamalkan dakwah rekonsiliatif. Salah satu contoh paling menonjol adalah mendiang K.H. Abdurrahman Wahid (Gus Dur). Sebagai seorang ulama, pemimpin Nahdlatul Ulama (NU), dan Presiden Republik Indonesia, Gus Dur secara konsisten mempraktikkan dakwah yang inklusif dan pluralis. Pemikirannya yang berani dalam menjembatani kesenjangan antara agama dan politik, pembelaannya yang gigih terhadap hak-hak kelompok minoritas, dan upayanya dalam mempromosikan dialog antariman merupakan manifestasi nyata dari prinsip *rahmatan lil 'ālamīn* dan *al-'adl*. Gus Dur menjadi teladan bagaimana seorang tokoh agama dapat menjadi agen perdamaian dan rekonsiliasi di tingkat nasional. (Subhan Maulana, 2023 and A. Fikri Amiruddin Ihsani, 2020).

Pada level kelembagaan, dua organisasi massa Islam terbesar di Indonesia, Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah, memainkan peran vital sebagai "penyangga infrastruktur sosial" bangsa. Keduanya secara konsisten mempromosikan pemahaman Islam yang moderat (*wasathiyah*), toleran, dan selaras dengan nilai-nilai kebangsaan. Melalui jaringan lembaga pendidikan (pesantren, sekolah, dan universitas), layanan kesehatan, dan program pemberdayaan sosial yang luas, NU dan Muhammadiyah telah terbukti menjadi benteng pertahanan terhadap ideologi ekstrem dan radikal (Septian Arief Budiman dan M. M. Setyahadi, 2019, h. 563). Pasca-pemilu yang memanas, para pemimpin kedua organisasi ini seringkali tampil sebagai penyeluk, menyerukan rekonsiliasi dan persatuan nasional, serta mendorong pertemuan antara elit politik yang berseteru. Kolaborasi antara NU, Muhammadiyah, dan ormas-ormas moderat lainnya menjadi kunci dalam program deradikalisasi dan penjagaan stabilitas sosial, menunjukkan bagaimana lembaga dakwah dapat berkontribusi secara konkret dalam meredam polarisasi. Keberhasilan mereka dapat ditelusuri dari kemampuan mereka untuk melembagakan kerangka etika Islam yang damai ke dalam struktur organisasi, kurikulum pendidikan, dan fatwa-fatwa publik mereka, menjadikan mereka sebagai tafsir hidup dari prinsip-prinsip rekonsiliasi Islam.



Strategi Dakwah Kontemporer untuk Membangun Jembatan Rekonsiliasi

Menghadapi kompleksitas polarisasi di era digital, dakwah rekonsiliatif memerlukan strategi yang inovatif, adaptif, dan terencana. Pendekatan konvensional tidak lagi memadai untuk menjangkau audiens yang terfragmentasi dan melawan narasi kebencian yang tersebar masif. Oleh karena itu, diperlukan pergeseran paradigma yang mendasar dalam metode dan medium dakwah.

1. Dakwah di Ruang Digital: Mengkonstruksi Kontra-Narasi Kebencian

Medan pertempuran narasi hari ini sebagian besar berada di ruang digital. Alih-alih hanya bersikap reaktif dengan melaporkan atau membantah konten negatif, strategi dakwah yang efektif harus berfokus pada konstruksi proaktif **kontra-narasi** atau **narasi alternatif** yang positif dan menarik. Ini berarti menciptakan dan menyebarluaskan konten yang menampilkan wajah Islam yang sejuk, toleran, rasional, dan inklusif. Konten tersebut tidak hanya membahas isu-isu ritual, tetapi juga mengangkat tema-tema kemanusiaan universal dari perspektif Islam, seperti keadilan sosial, pelestarian lingkungan, kesetaraan gender, dan kesehatan mental, sehingga menunjukkan Islam sebagai sumber solusi bagi masalah-masalah kontemporer. (At-Tawasul, 2023, h. 120).

Untuk dapat bersaing dalam ekosistem informasi digital yang padat, konten dakwah harus dikemas dalam format yang kreatif dan sesuai dengan preferensi audiens, terutama generasi muda. Ini termasuk penggunaan video pendek (seperti di TikTok dan Instagram Reels), infografis yang menarik secara visual, podcast dengan gaya percakapan yang santai, dan *storytelling* yang menyentuh emosi (Komunida, 2020, h. 50). Para dai dan lembaga dakwah perlu memahami cara kerja algoritma media sosial dan mengoptimalkannya untuk menyebarluaskan pesan damai seluas mungkin.

2. Pendekatan Komunikasi Empatik dan Dialog Lintas Iman

Di luar ruang digital, strategi komunikasi tatap muka tetap krusial. Namun, pendekatannya harus bergeser dari debat yang bertujuan untuk "menang" menjadi dialog yang bertujuan untuk "memahami." Ini memerlukan penerapan **komunikasi empatik**, sebuah model komunikasi yang menekankan pada mendengarkan secara aktif, menempatkan diri pada posisi orang lain, dan menahan diri dari penghakiman. Tujuannya adalah untuk membangun hubungan dan kepercayaan sebelum membahas perbedaan pandangan. Dakwah dengan pendekatan ini tidak memposisikan dai sebagai satu-satunya sumber kebenaran, melainkan sebagai fasilitator dialog yang rendah hati (Syukri Syamaun,, 2019).

Implementasi konkret dari pendekatan ini adalah melalui penyelenggaraan **dialog lintas iman dan lintas kelompok** yang terstruktur. Forum-forum ini harus dirancang bukan untuk memperdebatkan teologi, melainkan untuk berbagi pengalaman personal, membahas masalah-masalah bersama di tingkat komunitas (misalnya, masalah sampah, keamanan, atau pendidikan), dan bekerja sama dalam proyek-proyek sosial. Ketika individu dari kelompok yang berbeda bekerja bahu-membahu untuk tujuan bersama, stereotip dan prasangka akan terkikis secara alami, digantikan oleh pemahaman dan rasa hormat yang tulus. Ini adalah bentuk *dakwah bil-hāl* (dakwah melalui perbuatan) yang sering kali jauh lebih efektif daripada ribuan kata (Ittishol, 2021 and Jian, 2024, h. 45).



3. Pendidikan Dakwah Berbasis Literasi Perdamaian

Strategi jangka panjang yang paling fundamental adalah mereformasi sistem pendidikan kader dakwah. Lembaga-lembaga pendidikan Islam—mulai dari pesantren, madrasah, hingga fakultas dakwah di perguruan tinggi Islam perlu secara sistematis mengintegrasikan **kurikulum literasi perdamaian** ke dalam pembelajarannya (Rifki Rosyad,, 2022, h. 25). Kurikulum ini tidak boleh hanya menjadi mata pelajaran tambahan, melainkan harus meresap ke dalam seluruh proses pendidikan. Materinya harus mencakup beberapa pilar utama: (a) pendalaman teologi perdamaian dalam Islam (seperti yang dibahas di bagian II.B); (b) pelatihan keterampilan resolusi konflik dan mediasi non-kekerasan; (c) literasi media dan digital untuk membekali calon dai dengan kemampuan berpikir kritis dalam mengidentifikasi hoaks dan disinformasi; dan (d) studi tentang sejarah kerukunan dan kearifan lokal dalam mengelola keberagaman di Nusantara. Dengan demikian, akan lahir generasi baru para dai yang tidak hanya menguasai ilmu agama klasik, tetapi juga memiliki kompetensi sosial dan keterampilan komunikasi yang dibutuhkan untuk menjadi agen perdamaian di masyarakat modern.

4. Studi Kasus Praktik Dakwah Damai

Untuk menunjukkan bahwa strategi-strategi di atas bukanlah utopia, penting untuk melihat contoh-contoh nyata keberhasilannya di Indonesia. Sejarah mencatat **model dakwah kultural Walisongo** sebagai salah satu praktik dakwah damai paling sukses. Para wali tidak datang dengan memberangus budaya lokal, melainkan mengakulturasikannya dengan nilai-nilai Islam. Sunan Kalijaga, misalnya, menggunakan media seni seperti wayang, gamelan, dan tembang untuk menyampaikan pesan-pesan tauhid dengan cara yang halus dan mudah diterima oleh masyarakat Jawa saat itu. Pendekatan ini menunjukkan kearifan dalam memahami konteks sosial-budaya dan memilih strategi dakwah yang non-konfrontatif (Lentera, 2021, h. 110-112).

Di era kontemporer, muncul berbagai komunitas yang mempraktikkan model dakwah serupa. **Gerakan Maiyah** yang digagas oleh Emha Ainun Nadjib (Cak Nun) menjadi contoh ruang publik alternatif di mana orang dari berbagai latar belakang (agama, suku, status sosial, pilihan politik) dapat berkumpul untuk berdialog secara setara, kritis, dan reflektif tanpa agenda politik praktis. Komunitas-komunitas anak muda seperti **Komunitas Pendakwah Keren (KPK)** menggunakan pendekatan yang lebih modern dan kreatif, relevan dengan gaya hidup generasi milenial, untuk menyebarkan pesan Islam yang positif dan damai. Selain itu, banyak komunitas dakwah yang fokus pada kegiatan sosial (*dakwah bil-hāl*), seperti komunitas hijrah yang menyediakan layanan hapus tato gratis atau komunitas muslimah yang mengorganisir program bantuan untuk lansia dhuafa dan pengobatan gratis. Praktik-praktik ini membangun jembatan rekonsiliasi melalui tindakan nyata yang melayani kebutuhan dasar masyarakat, melampaui sekat-sekat ideologis (Siti Zaida Hanum dan Abraham Zakky Zulhazmi,, 2022, h. 112-114).

Tantangan dan Peluang Dakwah Rekonsiliatif di Masa Depan

Upaya untuk mengarusutamakan dakwah rekonsiliatif dihadapkan pada serangkaian tantangan yang signifikan, namun juga didukung oleh peluang-peluang strategis yang dapat dioptimalkan untuk masa depan yang lebih damai.



1. Tantangan

Tantangan pertama dan paling utama adalah **resistensi dari kelompok-kelompok Islamis eksklusif dan radikal**. Kelompok-kelompok ini seringkali memandang dakwah yang moderat, inklusif, dan toleran sebagai bentuk sinkretisme atau "pendangkalan akidah." Narasi mereka, yang dibangun di atas politik identitas, permusuhan terhadap "yang lain" (*the other*), dan klaim kebenaran tunggal, secara diametral bertentangan dengan pesan rekonsiliasi. Kehadiran mereka yang vokal dan terorganisir, terutama di platform digital, menciptakan medan pertempuran narasi yang sengit dan menjadi penghalang utama bagi upaya penyebaran pesan damai (Amsal Al-Qur'an, 2024 and Al-Tsiqah, 2020, h. 97).

Tantangan kedua adalah **disinformasi digital dan operasi "buzzer" yang sistematis**. Dakwah damai tidak beroperasi dalam ruang hampa, melainkan dalam ekosistem informasi yang telah tercemar oleh hoaks, fitnah, dan ujaran kebencian yang disebarluaskan oleh aktor-aktor bayaran untuk tujuan politik atau ideologis. Jaringan "buzzer" ini secara aktif bekerja untuk mendekreditasi tokoh-tokoh dan organisasi moderat, memelintir narasi keagamaan untuk memprovokasi kemarahan publik, dan memperdalam polarisasi. Serangan siber dan kampanye kotor ini menciptakan lingkungan yang toksik dan menghambat dialog yang sehat (Tazkia Nazdifa Assyahida,, 2024 and Teknika, 2024).

Tantangan ketiga bersifat internal, yaitu **bias ideologis dan kesenjangan kompetensi di kalangan para dai sendiri**. Masih banyak pendakwah yang terjebak dalam metode dakwah konvensional dan belum memiliki literasi digital, keterampilan produksi konten media, atau pemahaman tentang teori komunikasi modern yang diperlukan untuk bersaing secara efektif di era digital. Selain itu, beberapa dai mungkin secara tidak sadar masih membawa bias-bias kelompok yang menghalangi mereka untuk menyampaikan pesan yang benar-benar inklusif dan merangkul semua pihak. Kesenjangan antara penguasaan ilmu agama tradisional dengan kompetensi komunikasi kontemporer ini menjadi hambatan serius dalam implementasi strategi dakwah rekonsiliatif. (Ibnu Qomar El-Banthory,, 2014, h. 105 and Amin Abdullah, 2019, h. 45).

Dalam lanskap ini, tantangan yang paling mendasar adalah **krisis otoritas keagamaan**. Di era media sosial yang terdesentralisasi, otoritas keagamaan tidak lagi dimonopoli oleh lembaga-lembaga tradisional seperti NU, Muhammadiyah, atau MUI. Siapa pun dapat menjadi "ustaz dadakan" dan membangun pengikut dalam jumlah besar hanya dengan modal popularitas dan kemampuan retorika, tanpa melalui proses kaderisasi dan verifikasi keilmuan yang ketat (Fahri Ramadhan & Athaya Dzaikra, 2024, h. 2024, h. 73). Hal ini menyebabkan publik dibanjiri oleh berbagai fatwa dan pandangan keagamaan yang seringkali saling bertentangan, membingungkan, dan bahkan provokatif, sehingga otoritas suara-suara moderat yang kredibel menjadi tergerus (Idarotuna, 2023, h. 115).

2. Peluang

Di tengah berbagai tantangan tersebut, terdapat pula peluang besar yang dapat dimanfaatkan. Peluang pertama dan terbesar terletak pada **peran sentral generasi muda Muslim**. Generasi milenial dan Gen Z adalah *digital natives* yang secara inheren akrab dengan teknologi dan budaya digital. Mereka tidak hanya konsumen pasif, tetapi juga produsen konten



yang kreatif. Keterlibatan mereka dalam gerakan dakwah damai sangat krusial. Memberdayakan mereka dengan pengetahuan teologis yang moderat dan keterampilan produksi media dapat mengubah mereka menjadi pasukan siber yang efektif dalam menyebarkan narasi perdamaian, toleransi, dan persaudaraan melalui platform yang mereka kuasai, seperti TikTok, Instagram, dan YouTube (Fathurrahman 'Arif Rumata dan Muh. Rusydi,, 2021, h. 174 and Komunida, 2024, h. 248 and Tadbir, 2024, h. 260).

Peluang kedua adalah **potensi inovasi media dakwah digital yang tak terbatas**. Perkembangan teknologi terus membuka cakrawala baru untuk format dakwah yang lebih interaktif dan imersif. Penggunaan podcast untuk diskusi mendalam, webinar untuk kajian interaktif, hingga pemanfaatan *virtual reality* atau gamifikasi untuk pendidikan nilai-nilai Islam adalah beberapa contoh inovasi yang dapat membuat pesan perdamaian menjadi lebih menarik dan relevan bagi audiens modern. Kemampuan untuk mengemas pesan-pesan luhur dalam medium yang kontemporer adalah kunci untuk memenangkan perhatian di tengah kebisingan informasi (Siyar, 2023, h. 55).

Peluang ketiga adalah **momentum untuk kolaborasi strategis antar-organisasi keagamaan**. Ancaman bersama dari polarisasi, ekstremisme, dan disintegrasi sosial dapat menjadi katalisator yang kuat untuk mendorong kerja sama yang lebih erat antara NU, Muhammadiyah, dan berbagai organisasi masyarakat sipil moderat lainnya. Dengan membentuk aliansi atau konsorsium, mereka dapat menyatukan sumber daya, keahlian, dan jaringan yang mereka miliki untuk melancarkan kampanye perdamaian berskala nasional. Inisiatif bersama dalam produksi konten digital, program deradikalasi, dan advokasi kebijakan akan memiliki dampak yang jauh lebih besar daripada jika setiap organisasi bergerak sendiri-sendiri.

Pada akhirnya, peluang terbesar jangka panjang adalah mentransformasi esensi dakwah itu sendiri. Daripada sekadar menjadi **diseminasi informasi yang bersifat monolog**, dakwah memiliki potensi untuk menjadi **fasilitasi komunitas yang bersifat dialogis**. Kekuatan sejati media digital bukanlah kemampuannya untuk menyiaran pesan satu arah ke jutaan orang, melainkan kemampuannya untuk menghubungkan orang dan membangun komunitas. Strategi dakwah masa depan yang paling ampuh melawan polarisasi adalah dengan menciptakan dan merawat ruang-ruang komunitas digital yang inklusif, partisipatif, dan aman. Dalam ruang ini, generasi muda tidak hanya menjadi objek dakwah, tetapi subjek yang aktif berdialog, berkolaborasi, dan bersama-sama menciptakan narasi damai. Ini akan mengubah peran dai dari "orang bijak di atas panggung" (*sage on the stage*) menjadi "pembimbing di sisi" (*guide on the side*), sebuah pergeseran yang fundamental untuk masa depan dakwah yang rekonsiliatif (Tasamuh, 2020, h. 68).

KESIMPULAN

1. Anatomi dan Dampak Polarisasi Sosial, Politik, dan Keagamaan.

Polarisasi di Indonesia lebih dominan bersifat afektif, ditandai dengan sentimen emosional berbasis identitas (agama, etnis, dan politik) dibandingkan perdebatan programatik. Faktor pendorong utama adalah politisasi agama, peran media sosial dan disinformasi, serta interpretasi keagamaan yang eksklusif. Dampaknya meluas, merusak kohesi sosial, memicu



konflik horizontal, mengikis kepercayaan pada institusi negara, hingga menimbulkan fragmentasi epistemik di masyarakat.

2. Landasan Teologis dan Peran Dakwah Islam dalam Rekonsiliasi Sosial.

Dakwah Islam memiliki dimensi transendental sekaligus sosial yang menempatkannya sebagai instrumen penting dalam membangun narasi damai. Ajaran Islam berlandaskan prinsip *rahmatan lil 'alamin, ukhuwah, musyawarah*, serta *al-'adl wal ihsān* yang menolak eksklusivitas dan mendorong inklusivitas. Tokoh-tokoh seperti Gus Dur serta lembaga besar seperti NU dan Muhammadiyah membuktikan peran strategis dakwah inklusif dalam meredam konflik dan menjaga kohesi bangsa.

3. Strategi Dakwah Kontemporer sebagai Jembatan Rekonsiliasi.

Strategi efektif mencakup: (a) konstruksi kontra-narasi damai di ruang digital, (b) pendekatan komunikasi empatik dan dialog lintas iman, (c) pendidikan dakwah berbasis literasi perdamaian, serta (d) praktik dakwah kultural dan sosial (*dakwah bil-hāl*). Implementasi strategi ini mampu melawan narasi kebencian, memperkuat solidaritas, dan membangun kembali ruang publik yang sehat serta harmonis.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Amin. (2019). *Tantangan Dakwah di Era Globalisasi*. Yogyakarta: Samudra Biru.
- Abu Zahrah, Muhammad bin Ahmad. (t.t.). *Zahrah al-Tafāsīr*. Kairo: Dār al-Fikr al-‘Arabī.
- Al-Bukhārī, Muḥammad bin Ismā‘īl Abū ‘Abdillāh. (1422 H). *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*. (Muhammad Zuhayr bin Nāṣir al-Nāṣir, Ed.). Kairo: Dār Ṭawq al-Najāh.
- Al-Mazharī, Muḥammad Thanā’ Allāh. (1412 H). *Al-Tafsīr al-Mazharī*. (Ghulām Nabī al-Tūnisī, Ed.). Pakistan: Maktabah al-Rushdiyyah.
- Al-Ṭabarī, Abū Ja‘far Muḥammad ibn Jarīr. (2000). *Jāmi‘ al-Bayān ‘an Ta’wīl āy al-Qur’ān*. Beirut: Mu’assasat al-Risālah.
- Apriyanto, William Prima, Widadi, Siti Asri, & Zaky, Muhammad. (2025). Analisis Kriminologi terhadap Fenomena Buzzer di Media Sosial dan Dampaknya terhadap Legitimasi Media Pers. *Jurnal Sosial Politika*, 6(1).
- Ash-Shidiq, Muhammad Aulia. (2021). Ujaran Kebencian di Kalangan Pengguna Media Sosial di Indonesia: Agama dan Pandangan Politik. *Automata*, 2(1).
- Assyahida, Tazkia Nazdifa. (2024). Disinformation in Digital Elections: Cross-Border Actors and the Threat to Information Sovereignty. *Journal of Social and Political Sciences*, 8(2).
- At-Tawasul: Jurnal Komunikasi dan Penyiaran Islam. (2023). Counter-Narrative dalam Dakwah Digital: Strategi Melawan Islamofobia di Ruang Publik. *At-Tawasul*, 7(2).
- Baan. (t.t.). Polarisasi Politik di Indonesia.
- Budiman, Septian Arief, & Setyahadi, M. M. (2019). Peran Ormas Islam dalam Menjaga Stabilitas Politik Sosial Budaya Indonesia Pasca Pemilu 2019. *Jurnal Renaissance*, 4(2).
- El-Banthy, Ibnu Qomar. (2014). Problematika Dakwah Kontemporer di Indonesia. *Mimbar: Jurnal Sosial dan Pembangunan*, 30(1).
- Faizin, Hamam. (2017). Nilai-Nilai Pendidikan Karakter dalam Al-Qur'an Surat An-Nahl Ayat 90. *Tasyri'*, 24(2).



- Fikri, Muhammad Ali. (2021). Peran Pendidikan Agama Islam dalam Mempromosikan Perdamaian dan Rekonsiliasi Sosial. *Jurnal Sasana*, 7(1).
- Hajar al-‘Asqalānī, Ibnu. (1379 H). *Fath al-Bārī Syarḥ Sahīh al-Bukhārī*. Beirut: Dār al-Ma’rifah.
- Hanum, Siti Zaida, & Zulhazmi, Abraham Zakky. (2022). Strategi Dakwah Muslimah di Perkotaan (Studi Kasus Komunitas Humaira Surakarta). *Academic Journal of Da’wa and Communication*, 3(1).
- Idarotuna: Jurnal Kajian Manajemen Dakwah. (2023). Moderasi Beragama di Kalangan Generasi Z: Studi pada Ormas Islam NU dan Persis. *Idarotuna*, 7(1).
- Ihsani, A. Fikri Amiruddin. (2020). Dakwah Multikultural Gerakan Gusdurian Surabaya. (Tesis, UIN Sunan Ampel Surabaya).
- Irfan, Muhammad. (2023). Polarisasi Politik dan Dampaknya Terhadap Masyarakat. *JDIH Sukoharjo*.
- Ismail, Indriani H., & Hasaruddin. (2023). Reposisi Gerakan Islam Modern di Asia Tenggara. *Jurnal Ilmiah Syi’ar*, 23(1).
- Ittishol: Jurnal Komunikasi dan Penyiaran Islam. (2021). Religious Moderation-Based Communication Strategies in Resolving Socio-Religious Conflicts. *Ittishol*, 5(2).
- Jati, Wasisto Raharjo. (2020). Polarization of Indonesian Society during 2014–2020: Causes and Its Impacts toward Democracy. *JSP: Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, 24(2).
- Jian: Jurnal Ilmu Administrasi Negara. (2024). Peran Tokoh Agama dan Influencer Muslim dalam Dakwah Digital. *Jian*, 12(1).
- JRPP: Jurnal Review Pendidikan dan Pengajaran. (2023). Peran Media Dakwah Islam dalam Mencegah Konflik Sosial. *JRPP*, 6(2).
- Khazanah: Jurnal Studi Islam dan Humaniora. (2022). Dinamika Dakwah Islam di Ruang Publik Digital: Antara Polarisasi dan Rekonsiliasi. *Khazanah*, 20(1).
- Komunida: Media Komunikasi dan Dakwah. (2020). Peran Generasi Milenial dalam Mengkreasikan Dakwah di Era Digital. *Komunida*, 10(1).
- Komunida: Media Komunikasi dan Dakwah. (2024). Dakwah Moderat Habib Husein Ja’far Al-Hadar di Kalangan Milenial. *Komunida*, 14(2).
- Lentera: Jurnal Ilmu Dakwah dan Komunikasi. (2021). Akulturasi Islam dan Budaya Nusantara: Studi Keberhasilan Dakwah Damai. *Lentera*, 15(2).
- Marlef, Atika, dkk. (2025). Kapita Selekta Psikologi Sosial: Menggali Akar Polarisasi Politik di Indonesia. *Indonesian Journal of Education and Development Research*, 3(1).
- Mietzner, Marcus. (2024). Autocratisation in Indonesia: From Democratic Decline to Neo-Authoritarian Stability? *Third World Quarterly*, 45(5).
- Muthmainnah, Sitti. (2015). Peran Dakwah dalam Mengatasi Konflik-Konflik Sosial Masa Kini. *Jurnal Al-Khitabah*, 2(2).
- Pepinsky, Thomas B. (2021). Resentment and Polarization in Indonesia. *Journal of East Asian Studies*, 21(2).
- Quraish Shihab, Muhammad. (1996). *Wawasan Al-Qur'an: Tafsir Maudhu'i atas Pelbagai Persoalan Umat*. Bandung: Mizan.
- Quraish Shihab, Muhammad. (2002). *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an* (Vol. 8). Jakarta: Lentera Hati.



- Ramadhan, Fahri, & Dzaikra, Athaya. (2024). Islam Wasathiyah dan Tantangannya di Era Digital. *Sagoe Cendikia: Jurnal Studi Islam*, 1(1).
- Retnaningsih, Hartini. (2015). Ujaran Kebencian (Hate Speech): Pengaturan dan Penanganannya. *Info Singkat: Kajian Singkat terhadap Isu Aktual dan Strategis*, VII(21).
- Ronaldo, Riki, & Darmaiza. (2021). Politisasi Agama dan Politik Kebencian pada Pemilu Presiden Indonesia 2019. *Indonesian Journal of Religion and Society*, 3(2).
- Rosyad, Rifki. (2022). *Pendidikan Islam dan Tantangan Modernitas*. Bandung: UIN Sunan Gunung Djati Press.
- Rumata, Fathurrahman 'Arif, & Rusydi, Muh. (2021). Dakwah Digital sebagai Sarana Peningkatan Pemahaman Moderasi Beragama di Kalangan Pemuda. *Jurnal Ilmu Dakwah*, 41(2).
- Subhan, Maulana. (2023). Demokrasi Islam ala Gus Dur: Menggagas Rekonsiliasi Agama dan Politik. *Aktivis Autentik*.
- Syamaun, Syukri. (2019). The Transactional Model of Communication in Islamic Counseling Activities. *TAUJIEH: Jurnal Pendidikan Islam dan Manajemen*, 12(1).
- Syar: Jurnal Komunikasi dan Penyiaran Islam. (2023). Inovasi Dakwah di Era Digital: Transformasi Pesan Keagamaan Melalui Platform Modern. *Syar*, 8(1).
- Tadbir: Jurnal Manajemen Dakwah. (2024). Dakwah Moderat Duta Damai BNPT RI di Ruang Virtual. *Tadbir*, 6(2).
- Tasamuh: Jurnal Studi Islam. (2020). Dakwah Digital dan Generasi Milenial: Studi Kasus Santri di Era Informasi. *Tasamuh*, 12(1).
- Teknika: Jurnal Tadqiqat al-Ilm wa al-Ma'rifah. (2024). The Impact of Trolls and Disinformation on Digital Democracy in Indonesia's 2024 Elections. *Teknika*, 15(1).
- Wardani, Mufti. (2023). The Impact of Political Polarization on Social Cohesion in a Multicultural Society. *International Journal of Social Science and Human Research*, 6(10).